

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

RUBEN ARISTA PRABOWO
NPM. 0671010064

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG**

Disusun Oleh :

Ruben Arista Prabowo
NPM. 0671010064

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Subani, S.H, Msi.
NIP. 19510504 198303 1 001

Mas Anienda T.F., S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG**

Disusun Oleh :

Ruben Arista Prabowo
NPM. 0671010064

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 9 November 2010**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M. (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
2. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
3. Subani, S.H., M.Si. (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG**

Disusun Oleh :

Ruben Arista Prabowo
NPM. 0671010064

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
2. H. Sutrisno, S.H., M.Hum (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
3. Subani S.H., M.Si . (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

MOTTO :

Dan, yang bisa dilakukan seorang makhluk bernama manusia
terhadap mimpi-mimpi dan keyakinannya
mereka hanya tinggal mempercayainya.

Biarkan keyakinan kamu...

5 cm menggantung mengambang di depan kening kamu

Dan... sehabis itu yang kamu perlu... cuma...

cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya,

tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya,

leher yang akan lebih sering melihat ke atas,

lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja,

dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya,

serta mulut yang akan selalu berdoa.

Dan kamu *nggak* perlu bukti

apakah mimpi-mimpi itu akan terwujud nantinya,

kamu hanya harus mempercayainya.

(Donny Dhirgantoro – 5cm)

untuk Tri Lucky Sajekti

yang mewujudkan bagiku sebuah cinta dan cita

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruben Arista Prabowo
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 25 Januari 1988
NPM : 0671010064
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Rungkut Menanggal Harapan Z-27, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **“PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mengetahui
KETUA PROGRAM STUDI

Surabaya, 9 Nopember 2010
Penulis,

Subani, S.H, M.si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Ruben Arista Prabowo
NPM. 0671010064

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemberi nafas hidup seluruh makhluk. Hanya kepadaNya-lah syukur dipanjatkan atas selesainya skripsi dengan judul **“Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG”**. Sejujurnya penulis akui bahwa pendapat sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri, karena itu kebanggaan penulis bukanlah pada selesainya skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukkan diri sendiri. Semua kemenangan dicapai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi itu, penulis ”wajib” mengucapkan terima kasih kepada mereka yang disebut berikut :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta Penanggung Jawab Sementara Wakil Dekan I yang telah memberi kesempatan mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Sutrisno S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Subani, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta Dosen Pembimbing Utama yang memiliki empati terhadap kondisi penulis.
4. Ibu Mas Anienda T.F., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang meluruskan kesalahan-kesalahan penulis.

5. Bapak Panggung Handoko S.H., S.Sos., M.Hum selaku Dosen Wali.
6. Tim Penguji pada Seminar Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu.
8. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur beserta staf yang telah memberi pelayanan pengurusan administrasi.
9. Ibu Yana Indawati S.H., M.Kn, atas masukan dan diskusinya.
10. Mama, Bapak, Mami Endang, Mbak Retha, yang tiada henti-hentinya memberi dukungan moril dan materiil serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2006 khususnya Aseptya Nur Achmad dan Sahtanta Eka Prananta Tarigan, serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi hingga selesai.
12. Negeri Indonesia yang dengan sedih namun penulis cinta.

Sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, November 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI ...	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.5.1 Definisi E-mail	8
1.5.2 Proses Surat Menyurat Melalui E-Mail	9

1.5.3. Etika Surat Menyurat Melalui E-mail.....	10
1.5.4. Kelebihan dan Kekurangan E-mail.....	11
1.5.5. Definisi Pencemaran Nama Baik.....	11
1.5.6. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	15
1.5.7. Hak dan Kewajiban Pasien	16
1.5.8. Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi	19
1.5.9. Kode Etik Kedokteran	19
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Pendekatan Masalah	21
1.6.2 Sumber Data/Bahan Hukum	21
1.6.2.1 Bahan Hukum Primer	22
1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder	22
1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	22
1.6.3. Pengumpulan Data.....	22
1.6.4. Teknik Analisis Data	23
1.6.5. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINDAKAN MENGIRIMKAN MAILING LIST TENTANG

KETIDAK PUASAN PELAYANAN KESEHATAN	25
2.1. Hak dan Kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit	25
2.1.1. Hak dan Kewajiban Pasien.....	26
2.1.2. Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi	29
2.1.3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	30
2.2. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana	33

2.2.1. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) UU. ITE.....	33
2.2.2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.....	36
2.2.3. Tindakan Mengirimkan Mailing List Tentang Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan Masuk Kategori Pencemaran Nama Baik	39

BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASUS

PRITA MULYASARI	43
3.1. Dasar Jaksa Menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU. ITE, Pasal 310 ayat (2) KUHP, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP	43
3.1.1. Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU. ITE.....	43
3.1.2. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP	46
3.1.3. Unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP	47
3.2. Dasar atau Pertimbangan Hakim Membebaskan Prita.....	48
3.3. Analisa Hukum	56

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran.....	65
4.2.1. Untuk R.S. Omni Internasional.....	65
4.2.2. Untuk Masyarakat	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Bantuan Penggalan Data

Lampiran 2 : Bukti Pembayaran Pengiriman Berkas Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Bukti Pembayaran Salinan Putusan

Lampiran 4 : Salinan Putusan Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa	: Ruben Arista Prabowo
NIM	: 0671010064
Tempat, Tanggal Lahir	: Surabaya, 25 Januari 1988
Program Studi	: Strata 1 (S1)
Judul Skripsi	:

**PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan mengirimkan *Mailing List (Milis)* tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode induksi, yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal khusus. Hal-hal yang bersifat umum maksudnya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta penerapannya dalam praktik yang dirangkum menjadi kesimpulan dalam skripsi. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis, ilmiah, dan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal surat menyurat memang tergantung kepada penafsiran si penerima surat tersebut. Seperti halnya kasus Prita Mulyasari mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat *e-mail* yang kemudian dikirimkan kepada 20 orang temannya (*Milis*), dengan maksud untuk sekadar memberikan wacana kepada teman-teman dekatnya. Tetapi oleh teman-temannya tersebut, yang tidak dapat dipastikan siapa, disebar luaskan kembali hingga dapat diketahui atau diakses oleh pihak RS. Omni Internasional. Akibatnya, pihak RS. Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.

Dasar atau pertimbangan Hakim membebaskan Prita Mulyasari, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU. ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut : Unsur “setiap orang”, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Unsur “dengan sengaja”, jika dihubungkan fakta, maka atas pengiriman *e-mail* oleh Terdakwa tersebut telah

diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dikehendaki oleh Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai. Unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam point 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *e-mail* Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang yang sedang sakit dan mengharapkan kesembuhan.

Selanjutnya dipertimbangan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah sama yaitu tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan, hanya dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP termasuk didalamnya menyerang kehormatan dengan menggunakan gambar sedangkan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP diberikan ijin untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, sedangkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP klausula tersebut tidak disebutkan.

Karena *e-mail* Terdakwa tidak bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan tidak termasuk pengertian menista, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga tersebut diatas, dimana telah dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari ketiga dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Kata kunci : pencemaran nama baik, e-mail, milis.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan surat menyurat yang melaju sangat pesat ini diikuti dengan kemajuan teknologi yang telah menyentuh pelbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dibidang hukum, karena hukum merupakan suatu perangkat yang memiliki fungsi kontrol bagi masyarakat. Namun hukum tetap handal dalam melayani kebutuhan masyarakat dan tidak tertinggal oleh lajunya perkembangan sosial.

Salah satu bentuk jaringan informasi dunia hasil kemajuan teknologi adalah internet. Nilai lebih yang dimiliki internet telah mendorong pengguna/user untuk menggunakannya sebagai media atau alat mengadakan kontak atau hubungan jarak jauh. Penyampaian pesan secara jarak jauh dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui layanan elektronik yang bisa didapatkan melalui internet, dengan cara menggunakan Surat Elektronik/Electronic Mail (selanjutnya disingkat *e-mail*). Melalui *e-mail* dapat berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda jarak 12 wilayah waktu, sama seperti dengan seseorang yang ada di bangunan yang sama. Dan yang dimaksud dengan *e-mail* adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan surat atau pesan dengan cara menyimpan dan mengirimkan data surat atau pesan dengan melalui media komunikasi elektronik. Pesan dapat hanya dikirimkan kepada satu orang, tetapi bisa juga kepada ratusan orang

sekaligus, biasanya dikenal dengan *Mailing List* (kirim ke banyak anggota pengguna *e-mail*)¹.

Mailing List adalah sebagai salah satu ajang berkomunikasi bagi para pengguna dan kontributornya. Juga sering diistilahkan sebagai *Milis*, yaitu sebuah alamat *e-mail* yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk melakukan kegiatan tukar menukar informasi². Setiap pesan yang dikirimkan ke alamat sebuah *Milis*, secara otomatis akan diteruskan ke alamat *e-mail* seluruh anggotanya. *Milis* umumnya dimanfaatkan sebagai sarana diskusi atau pertukaran informasi diantara para anggotanya.

Kehadiran dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU. ITE) adalah sebagai bentuk *Lex Specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang lebih memfokuskan diri di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya yang terkait dengan tindakan pencamaran nama baik tersebut.

Pelbagai kemudahan yang diberikan oleh *e-mail* dalam proses surat menyurat melalui media elektronik ini ternyata tidak dilewatkan begitu saja oleh beberapa kalangan, diantaranya oleh kalangan yang memang menyambut baik fungsi *e-mail* itu sendiri, dan ada pula beberapa kalangan yang memang dari awal tidak berethikad baik.³ Mereka mempergunakan segala peluang yang ada untuk kesenangan mereka sendiri, memutarbalikkan fakta dari sebuah

¹Mico Pardosi, *Email, Website, dan Chatting*, Indah-Surabaya 2001

²<http://www.google.com/wikipedia/milis.html> ; 20/03/2010 ; pukul 19:45 WIB

³Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta-1996.

fenomena yang ada dengan menjelajah dunia maya dan melakukan sebuah permainan di balik halaman-halaman web yang ada. Yang beritikad baik pun terkadang masih disalahartikan oleh penerima *e-mail* itu sendiri.

Perihal surat menyurat memang tergantung kepada penafsiran si penerima surat tersebut. Seperti halnya kasus Prita Mulyasari mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat *e-mail* yang kemudian dikirimkan kepada 20 orang temannya, dengan maksud untuk sekadar memberikan wacana kepada teman-teman dekatnya. Tetapi oleh teman-temannya tersebut, yang tidak dapat dipastikan siapa, disebar luaskan kembali hingga dapat diketahui atau diakses oleh pihak RS. Omni Internasional. Akibatnya, pihak RS. Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 WIB, Prita Mulyasari datang ke RS. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya 27.000, pada waktu itu Prita ditangani oleh dr. Indah dan dinyatakan harus rawat inap.

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Prita pilih untuk menangani Prita. Selanjutnya Prita meminta referensi kepada dr. Indah karena Prita sama sekali tidak tahu. Dan referensi dr. Indah adalah dr.

Hengky. Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Prita yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah, dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspec demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection sekunder, sehingga malam itu Prita di infus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Prita mulai membengkak dan Prita meminta dihentikan infus dan suntikan.

Kemudian karena kondisi Prita semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Prita mengalami membengkak akhirnya Prita keluar dari RS. Omni Internasional. Pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil akhir parotitis gondokan dan langsung menuju RSI. Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12-15 Agustus 2008.

Dan dengan sehubungan rawatan Prita di RS. Omni Internasional, Prita menyampaikan komplain secara tertulis ke management RS. Omni Internasional yang diterima OGI (Customer Servis Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarren Nela (Customer Servis Manager), yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Prita pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan Prita tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatannya dari dr. Hengky. Akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Prita tidak

profesional sehingga Prita pada waktu dirawat di RSI. Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *e-mail* atau surat elektronik. Selanjutnya Prita mengirim *e-mail* tersebut melalui alamat *e-mail* pritamulyasari@yahoo.com ke sejumlah teman yang berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tetapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini” dan “tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali” dan “tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”.

Awal kegagalan dalam komunikasi hukum antara Prita Mulyasari dengan dokter-dokter yang merawatnya dapat kita lihat dari fakta, yakni :

“Esoknya saya dan keluarga menuntut dr. H untuk ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr. H mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak nafas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi. Konsidi saya semakin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri. dr. H tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus lagi. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr. H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya

saya bisa rawat jalan saja. dr. H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan”.

Persoalan Prita Mulyasari bisa sampai ke ranah hukum dikarenakan akibat proses komunikasi yang tidak berjalan dengan seimbang, karena pihak komunikan atau komunikator tidak berfungsi dengan baik. Sebenarnya komunikasi tidak berimbang ini tidak perlu harus masuk ke ranah hukum, karena penyelesaian sengketa melalui sarana hukum akan berbeda dampaknya. Peradilan pasti akan memutuskan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Namun demikian, setiap peradilan, hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak, sebelum sidang digelar. Skripsi ini dibuat mengetahui apakah tindakan mengirimkan *Mailing List* tentang ketidakpuasan pelayanan instansi kesehatan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan menganalisa putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

1.2. Rumusan Masalah

Perihal surat menyurat yang dapat dilakukan melalui *e-mail* dengan segala kemudahan serta keuntungan yang ditawarkan bukan malah menjadi tidak ada masalah. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin rawan terjangkiti tindakan kriminal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memang pada awalnya tidak beretika dengan segala fasilitas yang ada. Oleh sebab itu karena marak berkembangnya isu tentang pencemaran nama baik, maka berdasarkan penjelasan di atas memotivasi penulis untuk mengemukakan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah tindakan mengirimkan *Mailing List* tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku ?
- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap putusan kasus Prita Mulyasari?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan mengirimkan *Mailing List* tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan kasus Prita Mulyasari.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teori ilmu yang telah didapat sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah teori dan praktek sejalan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan kritis analitis yang ilmiah bagi mahasiswa dalam mencermati pelbagai perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait perkembangan IPTEK, yang membawa dampak dan perubahan besar bagi kehidupan manusia terutama dari segi Hukum Pidana.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Definisi E-Mail

Surat elektronik (disingkat **ratel**, **ratron**, **surel**, atau **surat-e**) atau surat digital atau pos elektronik (disingkat **pos-el**) atau nama umumnya dalam bahasa Inggris "*E-mail* atau *Email*" (ejaan Indonesia: **imel**) adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet.⁴

Surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman (dengan membeli perangko), tetapi *e-mail* umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada perkecualian misalnya *e-mail* ke telepon genggam, kadang pembayarannya ditagih per pengiriman.

Melalui *e-mail* kita dapat mengirim pesan baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu alamat *e-mail* ke alamat lain di jaringan internet. Apabila kita mengirim surat melalui *e-mail* kita dapat memperoleh beberapa keuntungan. Antara lain, dengan menggunakan *e-mail* surat (informasi) yang kita kirim ke alamat *e-mail* lain akan secara langsung diterima, selain itu biaya yang kita keluarkan cukup murah. Sebuah alamat *e-mail* biasanya memiliki format semacam username@host.domain, sebagai contoh :⁵

emailsaya@surabaya.vibriel.net.id

Keterangan:

- a. **emailsaya**: nama kotak surat (*mailbox*) atau nama pengguna (*username*) yang ingin dituju dalam *mailserver*

⁴Shirky, Clay, *Internet Lewat E-mail*, Elexmedia Kompatindo-Jakarta 1995.

⁵Sidharta Lani, *Internet Informasi Bebas Hambatan1*, Elexmedia Komputindo-Jakarta 1996.

- b. **surabaya.vibriel.net.id**: nama *mailserver* tempat pengguna yang dituju, rinciannya: **surabaya**: *subdomain* (milik pemegang nama *domain*), biasanya merujuk ke suatu komputer dalam lingkungan pemilik *domain*
- c. **vibriel**: nama *domain*, biasanya menunjukkan nama perusahaan/organisasi/perorangan (Vibriel)
- d. **net**: *second level domain*, menunjukkan bahwa *domain* ini termasuk kategori *networking* (net)
- e. **id**: *top level domain*, menunjukkan bahwa *domain* ini terdaftar di otoritas *domain*Indonesia (id).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-mail*, yang bisa dipersepsikan/disama artikan sebagai Informasi Elektronik adalah “Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

1.5.2. Proses Surat Menyurat Melalui E-Mail

Metode pengiriman untuk mengirim *e-mail* memerlukan suatu program *mail-client*. *E-mail* yang dikirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai di tujuan. Untuk lebih jelasnya lihat diagram dibawah. Contoh yang dipakai adalah layanan SMTP dan POP3. Menulis *e-mail* → *e-mail* client (di komputer pribadi) → SMTP server penyedia *e-mail*

pribadi → Internet → POP3 server penyedia *e-mail* penerima → *e-mail* client (di komputer si penerima) → surat dibaca si penerima⁶.

Terlihat *e-mail* yang terkirim hanya melalui 5 poin (selain komputer pengirim dan penerima). Sebenarnya lebih dari itu sebab setelah *e-mail* meninggalkan POP3 Server maka itu akan melalui banyak server-server lainnya. Tidak tertutup kemungkinan *e-mail* yang dikirim disadap orang lain. Maka dari itu bila *e-mail* yang dikirim mengandung isi yang sensitif sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan, dengan mengacak (enkrip) data dalam *e-mail* tersebut (contohnya menggunakan PGP, sertifikat digital, dan lain-lain).

1.5.3. Etika Surat Menyurat Melalui E-Mail

Etika dalam *e-mail* sama dengan etika dalam menulis surat biasa. Ada *e-mail* yang isinya formal ada yang informal. Beberapa poin penting:⁷

- a. Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran (*attachment*) yang terlalu besar (lebih dari 512 kB). Tidak semua orang mempunyai akses internet yang cepat, dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas *e-mail* penerima, sehingga akan ditolak *mailserver* penerima. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran *e-mail* yang dapat diterima (dan dikirim) penggunaanya,
- b. Jangan mengirim lanjut (*forward*) *e-mail* tanpa berpikir kegunaan bagi orang yang dituju.
- c. Selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong.
- d. Dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip seperlunya, jangan mau gampangnya mengutip seluruh tulisan orang itu.

⁶<http://www.google.com/prosessuratmenyuratmelaluie-mail.html> ; 20/03/2010 ; pukul 19:51 WIB.

⁷<http://www.google.com/etikamenggunakane-mail.html> ; 20/03/2010 ; pukul 19:57 WIB.

- e. Dalam menjawab *e-mail* orang lain, kutip bagian yang kita tanggapi saja, selain lebih jelas juga tidak memakan waktu/jatah akses penerima,
- f. Dalam mengutip tulisan orang ketiga, ingat hak cipta: kutip sesedikit mungkin dan rujuk ke tulisan aslinya.
- g. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan anda BERTERIAK.
- h. Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalanya sesuatu yang kita tulis akan terkesan berbeda dengan apa yang sebetulnya kita maksudkan.

1.5.4. Kelebihan dan kekurangan E-mail⁸

- a. Kelebihan menggunakan *E-mail* :
 - 1) Cepat (sangat cepat) karena hanya perlu beberapa menit (ketik dan send).
 - 2) Mudah (karena kita cukup mengetik di komputer).
 - 3) Multiple send (dapat mengirim ke beberapa orang sekaligus).
 - 4) Dapat mengirim file (attactment seperti file doc, excel, mp3, gambar, video dan lain-lain).
 - 5) Kapan saja dan dimana saja (tidak ada perbedaan lokasi dan waktu).
 - 6) Biaya lebih murah karena internet sekarang sudah mulai agak murah di Indonesia.
- b. Kekurangan menggunakan *E-mail* :
 - 1) Harus online (connect ke internet)
 - 2) Text dan gambar saja yang dapat dikirim (tidak bisa kirim paket/barang)
 - 3) Tidak connect internet dan check maka kita tidak akan tahu yang kitakirim sudah dibalas atau belum.
 - 4) Harus ingat username dan password.
 - 5) Ladang virus juga bagi yang tidak mengerti.

1.5.5. Definisi Pencemaran Nama Baik

Secara umum atau harafiah Pencemaran Nama Baik adalah “mencemarkan nama baik/reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar yang secara lisan atau tertulis”⁹.

⁸ AsriSitompul, *Hukum Internet*, PT. Citra Aditya Bakti-Bandung 2001.

⁹ <http://www.google.com/wikipedia/pencemarannamabaik.html> ; 21/03/2010 ; pukul 11:12

Menurut pakar/ahli telematika Roy Suryo berdasar kepada UU. ITE, ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik :¹⁰

Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan.

Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Menurut Eddy Os Hiariej, menanggapi pasal penghinaan bahwa bagi Indonesia pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan.¹¹

Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya

¹⁰<http://www.google.com/pendapatpakartelematikatentangpencemarannamabaik.html> ; 21/03/1010 ; pukul 11:32 WIB.

¹¹Eddy Os Hiariej, "Memahami Pencemaran Nama Baik", *Kompas*, Juni 2009.

timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik, sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Menurut Cahyana Ahmadjayadi, berkaitan dengan kasus yang menimpa Prita Mulyasari, ada dua kata kunci yang disebutkan dalam Pasal 27 UU. ITE yang jadi kunci kasus Prita. Kedua kata kunci itu adalah dengan sengaja dan tanpa hak.¹²

Menurut Rudi Satriyo, menjelaskan bahwa pencemaran nama baik dalam KUHP lebih berdimensi hukum privat daripada publik. Dengan demikian isu pencemaran nama baik lebih tepat jika hanya termuat di dalam KUHPerdata.¹³

Menurut ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik adalah “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran dengan pidana penjara paling lamasembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dalam Pasal 310 KUHP, kata-kata pencemaran nama baik secara tersirat, pasal tersebut menuntut pihak penegak hukum untuk

¹²Cahyana Ahmadjayadi, *Kompas*, Juni 2009.

¹³Rudi Satriyo, *Kompas*, Juni 2009.

membuktikan bahwa perbuatan mencemarkan nama baik adalah benar-benar perbuatan yang bertujuan untuk kepentingan umum, maka semua perbuatan yang dianggap melawan hukum itu, tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 310 ayat (3) KUHP, sebagai berikut:

“Apabila pemeriksaan itu ternyata bahwa terdakwa telah berbuat penghinaan betul-betul untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Apabila soal untuk pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar Pasal 310 KUHP”.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU. ITE, pencemaran nama baik adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya PT, Yayasan, Koperasi, dan sebagainya. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Perbuatan diatas, dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap suatu perbuatan yang dilarang.

¹⁴M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995. Hal. 226.

Dengan demikian, delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil, yakni unsur muatan penghinaan/atau pencemaran nama baik. Dalam pasal ini, tidak perlu dibuktikan akibat dari muatan penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik. Yang penting bahwa secara formal informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung muatan-muatan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁵

1.5.6. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit¹⁶

- a. Hak Rumah Sakit :
 - 1) Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
 - 2) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
 - 4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
 - 6) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - 7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.
- b. Kewajiban Rumah Sakit :
 - 1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
 - 2) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - 3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - 4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

¹⁵Siswanto Sunarsono, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta 2009. Hal. 98.

¹⁶Sofyan Lubis, M. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2009. Hal. 37-43.

- 5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- 6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- 7) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- 8) Menyelenggarakan rekam medis;
- 9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- 10) Melaksanakan sistem rujukan;
- 11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- 12) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- 13) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- 14) Melaksanakan etika Rumah Sakit;
- 15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- 16) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- 17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- 18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- 19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- 20) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

1.5.7. Hak dan Kewajiban Pasien

Perlindungan terhadap pasien telah mendapatkan perhatian yang cukup. Tujuan pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan secara optimal, baik individu maupun masyarakat.

Secara umum hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan,

moralitas, dan legalitas. Sementara mengenai hak pasien selalu dihubungkan dengan pemeliharaan kesehatan, maka hak utama dari pasien tentunya hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*). Hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan, sarana kesehatan, dan bantuan dari tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal.

Adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain :¹⁷

a. Hak Pasien, meliputi :

1) Hak Atas Informasi

Adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal terjadi hubungan dokter-pasien. Idealnya, isi minimal informasi yang harus disampaikan dokter, yaitu:

- Diagnosis (analisis penyakit menurut pengetahuan kedokteran).
- Resiko dari tindakan medis
- Alternatif terapi, termasuk keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif terapi.
- Prognosis (upaya penyembuhan)
- Cara kerja dokter dalam proses tindakan medis.
- Keuntungan dan kerugian tiap alternatif terapi secara luas.
- Semua resiko yang mungkin terjadi.
- Kemungkinan rasa sakit setelah tindakan medis.

2) Hak Atas Persetujuan

Dihubungkan dengan tindakan medis maka hak untuk menentukan diri sendiri diformulasikan dengan apa yang dikenal sebagai persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*). Hak ini adalah hak pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis yang ditawarkan oleh dokter, setelah dokter memberikan informasi.

3) Hak Atas Rahasia Kedokteran

Keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya, dikenal dengan nama rahasia kedokteran. Dokter berkewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang pasien dan penyakit pasien. Kewajiban dokter ini menjadi hak pasien.

Hak atas rahasia kedokteran adalah hak individu dari pasien. Hak individu ini akan dikesampingkan jika masyarakat menuntut.

¹⁷*Ibid.*

Sebagai misal, penyakit pasien akan membahayakan masyarakat (penyakit menular), maka meskipun pasien menolak untuk dibuka rahasia kedokterannya, dokter mempunyai kewajiban untuk membuka rahasia tersebut kepada pihak yang berwenang.

4) Hak Atas Pendapat Kedua (*Second Opinion*)

Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat antara dokter pertama dengan dokter kedua. Bisa saja seorang pasien diam-diam pergi ke dokter lainnya tanpa sepengetahuan dokter pertama. Yang dimaksud *second opinion* ini, adalah adanya kerjasama antara dokter pertama dengan dokter kedua. Dokter pertama akan memberikan seluruh hasil kerjanya kepada dokter kedua. Kerja sama bukan atas inisiatif pasien.

Dengan dilembagakannya hak atas pendapat kedua ini, sebagai hak pasien maka keuntungan yang didapat pasien sangat besar. Pertama, pasien tidak perlu mengulangi pemeriksaan rutin lagi. Kedua, dokter pertama dapat berkomunikasi dengan dokter kedua, sehingga dengan keterbukaan dari para pakar yang setingkat kemampuannya, dapat menghasilkan pendapat yang lebih baik.

5) Hak Untuk Rekam Medik.

Melihat rekam medik menjadi kewajiban dari dokter/rumah sakit. Rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Mengenai kepemilikan rekam medik adalah sebagai berikut :

- Berkas rekam medik adalah milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan.
- Isi rekam medik adalah milik pasien.

b. Kewajiban Pasien, meliputi :

- 1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- 2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- 3) Memenuhi ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan.
- 4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah diterima.

Seringkali yang menjadi masalah adalah tentang kepemilikan rekam medik ini, berkas milik sarana kesehatan, tetapi isi milik pasien. Kalau dikatakan isi rekam medik adalah milik pasien, bolehkah pasien untuk melihat rekam medik tersebut. Dalam hal ini, pendapat dari pakar hukum kesehatan menyatakan bahwa pasien berhak untuk melihat

berkas rekam medik termasuk untuk mendapatkan salinan dari rekam medik yang isinya adalah milik pasien.

1.5.8. Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi¹⁸

- a. Hak dokter atau dokter gigi :
 - 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas, sesuai standar prosedur operasional.
 - 2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar standar prosedur operasional.
 - 3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
 - 4) Menerima imbalan jasa.
- b. Kewajiban dokter atau dokter gigi :
 - 1) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar standar prosedur operasional, serta kebutuhan medis pasien.
 - 2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain, yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
 - 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
 - 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang yang bertugas dan mampu melakukannya.
 - 5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

1.5.9. Kode Etik Kedokteran¹⁹

- a. Kewajiban Umum
 - 1) Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
 - 2) Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi
 - 3) Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
 - 4) Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Anny Isfandyarie. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Dokter Buku I*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2006. Hal. 27-30.

- 5) Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien
 - 6) Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat
 - 7) Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
 - 8) Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.
 - 9) Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien
 - 10) Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien
 - 11) Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
 - 12) Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.
 - 13) Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
- b. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien
- 1) Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib menunjuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
 - 2) Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
 - 3) Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

- 4) Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
- c. Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat
 - 1) Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
 - 2) Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
- d. Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri
 - 1) Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
 - 2) Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan yaitu Statue Approach dan Conceptual Approach, yang berarti pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masyarakat.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.2. Sumber Data/Bahan Hukum

Ada dua sumber atau bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Proposal Skripsi ini, yaitu :

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945 ; (b) Peraturan Dasar : mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; (c) Peraturan Perundang-undangan ; (d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat ; (e) Yurisprudensi ; (f) Traktat ; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

1.6.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data skripsi diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum yang digunakan sebagai literatur dan dasar hukum dalam menganalisis permasalahan yang dikaji oleh penulis.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode induksi, yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum maksudnya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta penerapannya dalam praktik yang dirangkum menjadi kesimpulan dalam skripsi.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan. Mengawali seluruh uraian dan pembahasan dari permasalahan skripsi ini yang akan dijelaskan secara rinci pada bab-bab berikutnya. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian serta manfaat penelitian itu sendiri, hingga kepada kajian pustaka yang berisi tentang pengertian-pengertian dasar mengenai

permasalahan yang diangkat di dalam skripsi. Sedangkan pada bagian metodologi merupakan cara penggunaan metode Normatif dalam penyusunan skripsi sebagai laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab II, Tindakan mengirimkan *Mailing List* tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan. Dalam bab 2 ini terdiri dari 3 sub bab yang menjelaskan, pertama tentang tinjauan hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit, kedua tentang pencemaran nama baik menurut hukum pidana, ketiga tentang pencemaran nama baik menurut UU. ITE.

Bab III, Penerapan hukum terhadap putusan kasus Prita Mulyasari. Dalam bab 3 ini terdiri dari 2 sub bab yang menjelaskan, pertama tentang dasar Jaksa menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU. ITE, dan Pasal 310 ayat (2) KUHP serta Pasal 311 ayat (1) KUHP, kedua tentang dasar atau pertimbangan Hakim membebaskan Prita Mulyasari.

Bab IV, Penutup. Bab ini berisikan simpulan yang merumuskan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab uraian yang dikaitkan dengan bab pendahuluan (rumusan masalah), serta saran mengenai hal-hal yang masih mempunyai kelemahan dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.